

**KESIAPAN PEMDA PONOROGO DALAM MENERAPKAN BASIS  
AKRUAL SESUAI PP NO.71 TAHUN 2010**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Jurusan Akuntansi



Oleh :

**BELLA NOVITA AREA**  
NIM : 2015340783

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
S U R A B A Y A  
2017**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Bella Novrita Area

Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 11 Agustus 1993

N.I.M. : 2015340783

Program studi : Akuntansi

Program pendidikan : Strata 1 (S1)

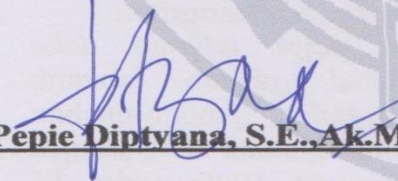
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan


Judul : Kesiapan Pemda Ponorogo Dalam Menerapkan Basis  
Akrual Sesuai PP No.71 Tahun 2010

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing,  
Tanggal : 9 April 2017....

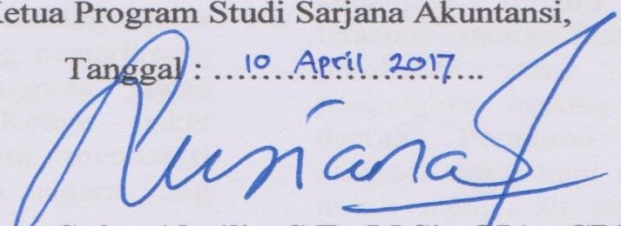
Co. Dosen Pembimbing,  
Tanggal : 5 April 2017...

  
(Pepie Dityana, S.E., Ak. MSi.)

  
(Nur'aini Rokhmania, S.E., Ak., M.Ak)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,

Tanggal : 10 April 2017....

  
(Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., OIA., CPSAK)

***THE PREPATION OF PONOROGO ADMINISTRATION REGENCY TO  
IMPLEMENT BASIC ACCRUAL BASE ON GOVERMENT RULE No. 71  
2010<sup>th</sup>***

Bella Novrita Area  
STIE Perbanas Surabaya  
Email: [belbelnovita@gmail.com](mailto:belbelnovita@gmail.com)  
Jalan Wonorejo Permai Utara III No. 16 Rungkut Surabaya

**ABSTRACT**

*This study is aimed to investigate the local government readiness in administering the new Governmental Accounting Standards (SAP) PP No. 71 of 2010 to serve accrual-based financial report. The local government in Ponorogo is carry out in this study as a recent area which implements SAP accrual-based in 2015. The data collection is analyzed using descriptive method. The data are obtained through documentation and interview. The finding shows that Ponorogo Local Government has been completely administered PP No. 71 of 2010 in their financial reports. However, there are several obstacles in its preparation such as insufficiency of human resource relates to accrual-based accounting knowledge and insufficiency of professional accounting employees. There fore, increasing the quality and quantity of human resources with suitable accounting background knowledge is necessary by conducting socialization and technical training to obtain a reliable and transparent financial report.*

**Keywords:** *accounting, government, accrual basic*

**PENDAHULUAN**

Reformasi keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2003 ditandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu undang - undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, undang - undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan undang - undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketiga paket undang - undang ini mendasari pengelolaan keuangan negara yang

mengacu pada *international best practices*. Setelah undang - undang tersebut, selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Reformasi pengelolaan keuangan Negara atau daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan Negara atau daerah. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi Negara untuk mengubah pola administrasi

keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan negara (*financial management*). Dengan adanya perubahan - perubahan undang - undang tersebut, tuntutan akan akuntansi pemerintahan semakin nyata.

Perwujudan *good governance* memerlukan perubahan paradigma pemerintahan baru yang mendasar dan menuntut suatu sistem yang mampu memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi secara regional, nasional maupun internasional yang bukan hanya menjadi pemerintah daerah yang terus menerus bergantung pada pemerintah pusat. Mewujudkan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya perubahan dibidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak. Perubahan dibidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (Friska Langelo, 2015).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) saat ini telah memasuki babak baru dengan adanya PP No. 71 tahun 2010 yang merupakan perubahan dari PP No. 24 tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan didasarkan pada akuntansi berbasis Akrual yaitu suatu entitas pelaporan dalam akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Laporan keuangan basis akrual tersebut merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010, maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti pemerintah daerah berkewajiban dalam menerapkan peraturan ini dan selambat - lambatnya pada tahun 2015. Menurut pemerintah, dengan melalui implementasi standar akuntansi berbasis akrual, kualitas penyajian informasi keuangan organisasi pemerintah dapat ditingkatkan. Kualitas laporan keuangan yang baik bermanfaat untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas pelayanan publik yang disediakan, manajemen dan pengendalian aset negara, perencanaan, penyusunan program dan anggaran. Informasi keuangan sektor publik yang berkualitas akan mengurangi kesenjangan informasi (*information asymmetric*) antara pemerintah dengan masyarakat dan *stakeholder* lain atas penggunaan dan alokasi keuangan Negara.

Pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dalam penerapan PP No. 71 tahun 2010 tentang sistem akuntansi berbasis akrual ini memiliki kendala atau masalah pada awal penerapannya bagi pemerintah daerah, seperti misalnya kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dalam menerapkan SAP berbasis akrual yang ditinjau dari sumber daya manusia dikatakan masih kurang yaitu kurangnya tenaga akuntan yang profesional dan berkualitas sehingga dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah DPPKAD sangat membutuhkan SDM yang memiliki

keahlian di bidang akuntansi, sistem informasi yang masih kurang memadai, selain itu rendahnya keterampilan dasar akuntan publik juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, meskipun Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki kendala tetapi masih mampu berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2015 ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)).

Terdapat alasan pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo karena Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten yang baru menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah PP. No.71 Tahun 2010 yang berbasis akrual. Pada penerapannya ini, pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo memiliki tantangan baru untuk dapat melaksanakan dan menerapkan SAP dengan baik dan efektif. Namun, pada kenyataannya Pemerintah Ponorogo masih banyak kendala atau masalah dalam proses penerapannya. Penerapan yang baik perlu dukungan dari berbagai pihak. Dari pemerintah sendiri yaitu dukungan dari sumber daya manusia yang meliputi pembuat dan pengguna informasi keuangan, sarana dan prasarana serta sistem informasi yang ada di pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Di Pemerintahan Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan SKPD merupakan sumber yang dapat digunakan untuk menyusun Laporan

Keuangan PPKD. Setiap SKPD dan PPKD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin secara tepat dan efektif. Kedua subsistem tersebut merupakan bagian dari Pemerintah yang penting untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara langsung. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi harus dikembangkan untuk strategi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual di Ponorogo.

Uraian dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penulis ingin meneliti tentang Kesiapan Pemda Ponorogo Dalam Menerapkan Basis Akrual Sesuai PP No.71 Tahun 2010.

## **RERANGKA TEORITIS**

### **Pemerintahan Daerah**

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Moh. Mahsun (2011:5) akuntansi sektor publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum.

Bidang kesehatan, pendidikan, keamanan dan transportasi adalah contoh sektor publik. Oleh karena area sektor publik sangat luas, maka dalam penyelenggaraannya sering diserahkan ke pasar, namun pemerintah tetap mengawasinya dengan sejumlah regulasi. Bahkan beberapa bidang sektor publik dikelola dengan menggunakan sumber pendanaan dari sumbangan atau dana amal.

### **Akuntansi dalam Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu percabangan akuntansi, selain akuntansi sosial yang mencatat perhitungan makro Negara dan akuntansi komersial yang digunakan oleh perusahaan dalam mengelola transaksi bisnisnya. Dibanding kedua percabangan lainnya akuntansi pemerintah relatif lebih tertinggal meskipun sebuah langkah besar telah diambil Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peran akuntansi dalam pemerintah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

### **Akuntansi Berbasis Akrua**

Menurut Harun (2009:43) Akuntansi Berbasis Akrua adalah

sebuah metode umum dalam sistem pencatatan akuntansi *double entry* yang mempertemukan pendapatan dan biaya pada periode yang saling berkaitan. Akuntansi berbasis akrua ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah memberikan gambaran bagaimana pemerintah membiayai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan pendanaannya. Sedangkan kekurangannya adalah penerapan basis ini perlu mempersiapkan biaya yang cukup besar karena untuk menangani penilaian aset, penyiapan kebijakan akuntansi, membangun sistem akuntansi untuk mendukung sistem tersebut dibutuhkan komputer atau peralatan lainnya serta sumber daya manusia yang siap untuk menangani akuntansi pemerintah berbasis akrua.

### **Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan SAP PP Nomor 71 Tahun 2010**

Komponen laporan keuangan yang tertera dalam Standar Akuntansi Pemerintah PP No 71 tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas (LAK)
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
6. Laporan Operasional (LO), dan
7. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

**Tabel 1**  
**Perbedaan Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menurut**  
**Basis Kas Menuju Akrual dan Basis Akrual**

No.	Jenis Laporan Keuangan	Basis Kas Menuju Akrual	Basis Akrual
1.	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	V	V
2.	Neraca	V	V
3.	Laporan Arus Kas (LAK)	V	V
4.	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	V	V
5.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)	-	V
6.	Laporan Operasional (LO)	-	V
7.	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	-	V

Keterangan V menunjukkan wajib disusun dan disajikan oleh pemda

### **Teori Kesiapan**

Definisi kesiapan untuk berubah yang dikemukakan oleh Holt dalam (Wiyono:2008) adalah Sikap komprehensif yang mempengaruhi secara berkelanjutan oleh isi, proses, konteks, dan individu, melibatkan dan secara kolektif merefleksikan keluasan terhadap individu atau sekumpulan individu sebagai kenaikan secara kognitif dan secara emosional untuk menerima, menyetujui, dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermaksud untuk mengubah status quo (mempertahankan keadaan sekarang yang tetap seperti keadaan sebelumnya).

### **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Pengertian SDM dibagi menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau

warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lainnya. Jadi, sumber daya manusia (SDM) adalah semua orang yang terlibat yang bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan.

### **Sistem Informasi**

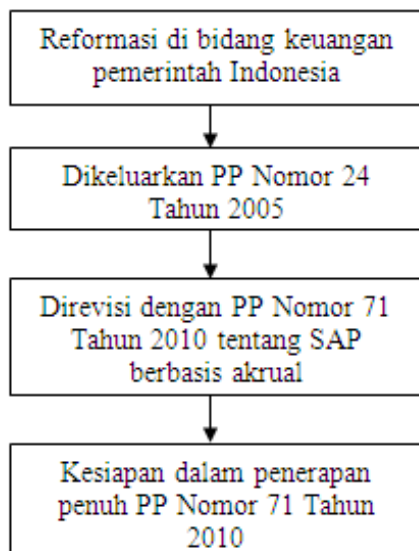
Menurut Mukhtar (2002 : 2) sistem adalah suatu entitas yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sistem yang relevan dengan tugas akuntansi adalah *computer based system*, yang dapat diartikan integrasinya peralatan, program, data, dan prosedur untuk menjalankan satu tugas pada suatu komputer. Kesuksesan suatu sistem

membutuhkan tujuan-tujuan yang terdefiniskan. Suatu sistem dengan tujuan tertentu akan menyelesaikan lebih banyak untuk suatu organisasi, daripada sistem tanpa tujuan, sedikit tujuan, atau tujuan yang ambisius.

### Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya. Sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung. ([www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org))

Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian adalah sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**Kerangka pemikiran**

## METODE PENELITIAN

### Rancangan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2005), mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah "Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena untuk mendeskripsikan serta menggambarkan mengenai fakta-fakta yang ada.

Dari jenis penelitiannya, penelitian ini tergolong jenis penelitian studi kasus, karena studi kasus lebih cocok digunakan bila pertanyaan bagaimana atau mengapa. Emzir (2012:20), mendefinisikan Penelitian studi kasus adalah "suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi".

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji secara empiris tentang kesiapan pemda Ponorogo dalam menerapkan basis akrual sesuai PP No.71 Tahun 2010. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber atau jenis data penelitian ini adalah data primer diperoleh dari wawancara, dokumen, dan percakapan informal.



## Batasan Penelitian

Penelitian ini terfokuskan pada SAP yang berbasis akrual dengan menerapkan SAP PP No.71 Tahun 2010 yang mengharuskan Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan dengan baik berdasarkan SAP basis akrual. Oleh karena itu, Kota Ponorogo menjadi objek yang menarik untuk diteliti tentang bagaimana kesiapannya dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual apakah sudah baik dan efektif apa belum.

## Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data menggunakan dua teknik atau metode, yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

### a. Teknik Wawancara

Menurut Moleong (2005:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi kunci yang dibutuhkan di wilayah penelitian.

### b. Teknik Dokumentasi

Dokumen ini merupakan pelengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini juga merupakan suatu proses untuk memperoleh data-data yang

terkait dengan kesiapan pemerintah kabupaten Ponorogo dalam penerapan akuntansi berbasis akrual.

## Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dapat menjawab perumusan masalah pada penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metode studi kasus (*case study*) yaitu dengan cara:

1. Mendeskripsikan kesiapan pemerintah kabupaten Ponorogo dalam menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 yang ditinjau dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasaran serta sistem informasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo saat ini.
2. Mendeskripsikan komponen-komponen Laporan Keuangan yang diterapkan dalam pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Daerah, yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian.
3. Melakukan analisis dari hasil penyajian data mengenai penerapan SAP basis akrual dan kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan SAP No. 71 Tahun 2010.
4. Melakukan penarikan kesimpulan dengan menginterpretasikan secara keseluruhan dari data yang telah dianalisis.

## **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Dalam mengimplementasikan PP No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual yang merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan yang terbaru, Pemerintah Kabupaten Ponorogo memerlukan strategi - strategi agar suatu tujuan dapat tercapai. Untuk dapat mengimplementasikan basis akrual, maka dibutuhkan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam menerapkan SAP basis akrual tersebut, maka diperlukan kesiapan-kesiapan seperti kesiapan dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem informasi.

### **1. Kesiapan dari Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana serta sistem informasi terhadap Pelaksanaan SAP**

#### **a. Kesiapan pemerintah kabupaten Ponorogo dalam menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 ditinjau dari segi Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ponorogo.**

Dalam penerapan basis akrual yang dapat dikatakan masih baru, kesiapan dari sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting. Karena dengan kemampuan dan pemahaman yang dimiliki SDM untuk menguasai konsep akrual sangat mempengaruhi proses berlangsungnya kinerja PPKD untuk menerapkan SAP basis akrual. Untuk

menarapkan SAP tersebut dibutuhkan kualitas SDM yang kompeten dan berpengalaman dalam hal akuntansi sektor publik khususnya bidang akuntansi basis akrual yang merupakan perubahan SAP yang baru. Sebagian besar SDM yang mampu menguasai bidang akuntansi basis akrual adalah SDM yang memiliki riwayat pendidikan dari bidang akuntansi. Selain itu, dalam menerapkan SAP dengan baik maka dilakukan pelatihan khusus untuk mendukung dalam melaksanakan basis akrual yaitu dengan diadakannya bimbingan teknis (BIMTEK) dari masing-masing SKPD atau PPKD pada Pemerintah Daerah. Sehingga dengan menambah pemahaman dan kemampuan sumber daya manusia diharapkan dapat menerapkan SAP basis akrual dengan baik.

Namun pada kenyataannya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ponorogo masih banyak kendala atau hambatan dari segi SDM. Masih banyak sumber daya manusia yang kurang memahami bagaimana penerapan basis akrual, hal itu disebabkan karena sebagian besar riwayat pendidikan SDM di DPPKAD Kabupaten Ponorogo bukan murni lulusan dari akuntansi. Masing-masing SDM banyak yang masih bergantung pada staf atau pegawai lain yang dianggap

memiliki kemampuan dan pemahaman lebih di bidang akuntansi. Pemerintah Kabupaten Ponorogo sendiri juga sudah lama tidak melakukan rekrutmen PNS sehingga DPPKAD hanya bisa memanfaatkan SDM yang telah ada. Oleh karena itu, dalam

mempersiapkan SAP basis akrual, DPPKAD melakukan Bimbingan teknis secara rutin untuk membekali setiap sumber daya manusia agar dapat menerapkan SAP basis akrual dan dapat menguasai seluruh materi dari basis akrual tersebut.

**Tabel 2**  
**Data pegawai DPPKAD bagian anggaran dan akuntansi**

Karakteristik	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
Jenis Kelamin	Pria	7	54%
	Wanita	6	46%
Usia	< 25 tahun	-	-
	25-50 tahun	11	84,6%
	> 50 tahun	2	15,4%
Pendidikan	SMA	4	30,8%
	Diploma	-	-
	S-1/S-2	9	69,2%
Lulusan	Akuntansi	2	15,4%
	Lain-lain	11	84,6%
Lama Bekerja	< 5 tahun	-	-
	5-10 tahun	4	30,8%
	> 10 tahun	9	69,2%

Sumber : DPPKAD Kabupaten Ponorogo

Jadi dapat disimpulkan bahwa usia pegawai 25-50 tahun yang berpendidikan SMA sejumlah 2 orang, berpendidikan S-1/S-2 sejumlah 9 orang maka tingkat pendidikannya sudah bisa dikatakan baik lalu dengan riwayat lulusan dari akuntansi berjumlah 2 orang lulusan lain-lain berjumlah 11 orang, dengan frekuensi lama bekerja 5-10 tahun sejumlah 4 orang ini menunjukkan bahwa di bagian anggaran dan akuntansi mayoritas dikatakan masih

muda dan meskipun masih ada yang lulusan pendidikan dari SMA tetapi mampu membekali SDM untuk melakukan kegiatan operasional keuangan pemerintah daerah khususnya dalam penerapan SAP basis akrual yang masih baru. Lalu untuk usia pegawai diatas 50 tahun yang berpendidikan SMA sejumlah 2 orang dengan frekuensi lama bekerja lebih dari 10 tahun sejumlah 9 orang ini menunjukkan bahwa di bagian anggaran dan akuntansi meskipun mereka sudah

berusia diatas 50 tahun dan berpendidikan hanya dari lulusan SMA mereka masih mampu bekerja dengan efektif dan efisien, dan mereka juga banyak mempunyai pengalaman kerja di bidang sektor publik.

**b. Kesiapan pemerintah kabupaten Ponorogo dalam menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 ditinjau dari segi Sarana dan Prasarana dan Sistem Informasi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ponorogo.**

Tidak hanya segi sumber daya manusia saja, tetapi dari sarana dan prasarana serta sistem informasi juga sangat dibutuhkan dalam menerapkan SAP basis akrual. Dari segi sarana dan prasana dan sistem informasi dibutuhkan sarana pendukung berupa alat-alat yang mampu mengoperasikan seluruh kegiatan yang meliputi penerapan akuntansi basis akrual. Seperti buku pedoman yang sesuai dengan aturan, teknologi informasi berupa hardware dan software yang memadai, khususnya dalam aplikasi penatausahaan dan pengolahan untuk penerapan akuntansi basis akrual. Selain itu, untuk menerapkan SAP tersebut dibutuhkan pendanaan atau anggaran yang cukup. Karena pendanaan tidak hanya untuk investasi awal, tetapi

juga untuk keberlangsungan kegiatan yang bersifat pemeliharaan. Hal ini dimaksudkan dalam menerapkan basis akrual membutuhkan pembaharuan yang terus menerus, sehingga dengan tersedianya dana yang cukup maka kegiatan dalam menyajikan suatu Laporan Keuangan Daerah dapat berlangsung dengan baik.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ponorogo telah mempersiapkan sarana dan prasarana serta sistem informasi yang akan dibutuhkan dalam penerapan SAP basis akrual. Seperti fasilitas ruang untuk kegiatan operasional akuntansi basis akrual, buku panduan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menerapkan akuntansi basis akrual, hardware dan software yang telah diperbarui dari yang manual (excel) sekarang telah berganti pada sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) yang terbaru. DPPKAD juga sudah mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan operasional SAP basis akrual dengan bantuan dari pemerintah pusat. Dari segi sarana dan prasarana serta sistem informasi, DPPKAD sudah dapat dikatakan cukup siap untuk melaksanakan SAP basis akrual.

Dari uraian tersebut dapat dilihat hambatan atau

kendala pada pemerintah Daerah Ponorogo yang paling besar adalah dari segi SDM yang masih belum bisa menguasai penerapan dari basis akrual. Masih kurangnya tenaga akuntan pada PPKD ataupun masing-masing SKPD. Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki menjadi kendala tersendiri. Karena sebagian besar lulusan sumber daya manusia bukan dari akuntansi. Ketika pelaksanaan basis akrual ini diterapkan dalam pemerintah daerah, masalah mengenai laporan keuangan seolah-olah menjadi topik utama yang menjadikan basis akrual ini sebagai sesuatu yang sulit. Mengingat bahwa peran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selaku PPKD dalam mengelola keuangan pemerintah daerah tentunya harus bertanggungjawab atas kesiapan-kesiapan dalam menerapkannya.

Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa DPPKAD Kabupaten Ponorogo sekarang memakai jenis software Bimbingan Teknis SIMDA versi 2.7.10 berbasis akrual pada tahun 2015 dan mekanismenya ada di SAPD Perbup No. 56 tahun 2015. Bimbingan Teknis ini memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan suatu daerah. Kajian di berbagai negara juga

menunjukkan, kuatnya hubungan antara Bimtek sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia dengan tingkat perkembangan bangsa yang ditunjukkan oleh berbagai indikator ekonomi dan sosial budaya.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengadakan kerja sama dengan BPKP untuk melakukan Bimbingan Teknis agar dapat lebih memahami SIMDA Versi 2.7.10. Melalui Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan aparat agar dapat terampil memanfaatkan dan menggali peraturan sehingga mampu mengaplikasikan dalam mengelola dan menggunakan anggaran yang ada, dengan menjunjung prinsip efektifitas, efisien, akuntabilitas dan transparansi.

Akrual yang ada di Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah yang dulu hanya menggunakan 4 jenis laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sekarang ketambahan 3 laporan keuangan yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) jadi sekarang ada 7 jenis laporan keuangan. Jadi untuk kesiapan PEMDA Ponorogo dalam menerapkan basis akrual

Ponorogo sudah siap dibandingkan dengan PEMDA lain.

## **2. Penyajian Basis AkruaL Laporan Keuangan**

### **a) Basis Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Ponorogo adalah basis akruaL untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian.

Basis akruaL untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan

berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akruaL untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

### **b) Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Ponorogo**

#### **Neraca**

Kebijakan akuntansi neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian neraca untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan.

**Laporan Realisasi Anggaran**  
Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

**Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**  
Kebijakan Akuntansi atas Laporan Saldo Anggaran Lebih adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

**Laporan Operasional**  
Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

**Laporan Perubahan Ekuitas**  
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan pokok yang sekurang-

kurangnya menyajikan pos-pos:

- a. Ekuitas awal
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi – koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode – periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap, dan
- d. Ekuitas akhir

**Laporan Arus Kas**  
Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.

**Catatan atas Laporan Keuangan**  
Kebijakan akuntansi Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) harus diterapkan pada laporan keuangan untuk tujuan umum oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.

c) **Kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Ponorogo dengan PP No. 71 Tahun 2010**

Pemerintah daerah kabupaten Ponorogo dalam menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara keseluruhan telah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 mengenai penerapan standar akuntansi berbasis akrual, yaitu pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, neraca, laporan operasional, Laporan Arus Kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Namun pada Laporan Arus Kas masih belum sesuai, pada LKPD Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyebutkan dengan istilah pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi Asset Non Keuangan, sedangkan dalam PP No 71 tahun 2010 menyebutkan dengan pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi. Pemerintah Kab. Ponorogo juga masih menyebutkan Arus kas dari aktivitas pembiayaan, sedangkan pada PP No. 71 tahun 2010 menyebutkan dengan istilah aktivitas pendanaan, dan Arus kas dari aktivitas non anggaran, sedangkan pada PP No. 71 tahun 2010 menyebutkan dengan aktivitas transitoris. Namun, secara keseluruhan isi dan maksud dari penyajian laporan Keuangan Kabupaten Ponorogo sudah sesuai dengan apa yang telah dijabarkan pada PP No. 71 Tahun 2010.

## **KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis mengenai kesiapan pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menerapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan dari segi sumber daya manusia

Kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam menerapkan SAP berbasis akrual yang ditinjau dari Sumber daya manusia dikatakan masih kurang. Karena masih minimnya tenaga akuntan yang profesional dalam mengaplikasikan penerapan akrual yang ada di Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Banyak SDM yang bukan merupakan riwayat pendidikan dari Akuntansi sehingga masih banyak yang bergantung pada pihak yang dianggap memiliki keahlian lebih di bidang akuntansi. Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga sudah 4 tahun tidak melakukan rekrutmen PNS baru, sehingga harus memanfaatkan SDM yang ada. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Ponorogo secara rutin mengikuti bimbingan teknis (BIMTEK) yang diadakan baik dari pihak BPKP ataupun dari pihak kementerian pusat untuk mendorong SDM yang profesional dan mampu mengoperasikan aplikasi dalam menerapkan akuntansi basis akrual di Pemerintah Kabupaten Ponorogo.



2. Kesiapan dari segi sarana dan prasarana  
Kesiapan dari segi sarana dan prasarana yang ada di Pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah mendukung. Seperti fasilitas ruang, buku panduan basis akrual yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menerapkan basis akrual sudah ada. Dari anggaran untuk menyiapkan secara keseluruhan sudah disediakan baik anggaran dari pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo sendiri maupun bantuan dari Pemerintah Pusat.
3. Kesiapan dari segi Sistem Informasi  
Sistem Informasi dalam mengoperasikan basis akrual baik Software dan hardware sudah mendukung. Sudah adanya perubahan yang sebelumnya masih menggunakan excel (manual) sekarang telah menggunakan sistem online, sehingga memudahkan PPKD untuk menganalisis Laporan dari berbagai SKPD di pemerintah Kabupaten Ponorogo.

#### **Keterbatasan**

Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) bukan keseluruhan PEMDA Kabupaten Ponorogo.
2. Pada penelitian ini untuk metode wawancara masih belum maksimal dikarenakan keterbatasan waktu relatif singkat sehingga jawaban yang

dihasilkan dari informan terbatas.

#### **Saran**

Mengacu pada hasil analisis yang dilakukan, terdapat beberapa saran antara lain:

1. Untuk penelitian selanjutnya, objek dapat diperluas dengan melakukan penelitian di seluruh PEMDA Kabupaten Ponorogo.
2. Memastikan jadwal untuk wawancara dengan informan tidak terbentur jadwal lain, agar wawancara dapat berjalan dengan lancar.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Emzir. 2012. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta Rajawali: Pers
- Erlita D.S. Ranuba, Sifrid Pangemanan, dan Sherly Pinatika. 2015. "Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Pada DPKPA Minahasa Selatan". *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No. 1, hal: 388-397.
- Fitri Ayu Lestari Niu, Herman Karamoy, dan Steven Tangkuman. 2014. "Analisis Penerapan PP. No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu". *Jurnal EMBA*, Vol. 2, No. 4, hal: 714-722.

- Halim, A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006. Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Harun. 2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harun dan Haryono P. Kamase. 2012. "Accounting Change and Institutional Capacity: The Case of a Provincial Government in Indonesia". *AABFJ | Volume 6, no. 2, 2012*
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2002. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Langelo, F., D. P. E. Saerang, dan S. W. Alexander. 2015. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung". *Jurnal EMBA, Vol. 3, No. 1, hal: 1-8.*
- M Luthfi Iznillah. 2015. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Terhadap Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI". *Jom FEKON Vol.2 No.2 Oktober 2015.*
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mohamad Mahsun., Firma Sulistiyowati., dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, A.M. 2002. *Audit Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Edisi ke-1. Andi Offset, Yogyakarta
- Nordiawan, D., I. S. Putra, dan M. Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ni Made Ari Widyastuti, Edy Sujana, dan I Made Pradana Adipura. 2015. "Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Di Kabupaten Gianyar". *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Volume 3 No.1*
- Robert K. Yin. 2009. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sampel, I. F., L. Kalangi, dan T. Runtu. 2015. "Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Manado dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Basis AkruaI". *Jurnal EMBA, Vol. 3, No. 1, hal: 621-630.*
- Simanjuntak, B. H. 2005. "Menyongsong era baru akuntansi pemerintahan

Sitorus, S., L. Kalangi, dan S. K. Walandouw. 2015. "Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Berdasarkan PP. No. 71 Tahun 2010 pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon". Jurnal EMBA, Vol. 3, No. 1, hal: 941-949.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Online:

Indonesia" <http://www.ksap.org/sap/menyongsong-era-baru-akuntansipemerintahan-di-indonesia/>. [diakses pada 20April 2016]

[www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) diakses 24 September 2016

[www.elib.unikom.ac.id](http://www.elib.unikom.ac.id) diakses 6 Oktober 2016

[www.dppkad.ponorogo.go.id](http://www.dppkad.ponorogo.go.id) diakses 27 Desember 2016

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org) diakses 20 Februari 2017